

KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA KAREGESAN KEC. KAUDITAN KAB. MINUT

(Satu Studi Di Desa Karegesan Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara)

Nanda Agnesya Weenas

Daicy. Lengkong

Rully Mambo

The figure of the professional and leadership required to properly master the job exceeds the average of existing employees, as well as having high moral commitment on its work in accordance with the code of ethics profession as a leader. Leader / Leadership is a subject that should encourage community participation in development through the demands and suggestions and effective decision-making to the people to achieve development goals.

In Law Number 32 Year 2004 on Regional Government as changes in Law No. 12 Year 2008 and Government Regulation No. 73 of 2005 on Regional, village, and village, chapter 4, explained that referred to in has the task of conducting the affairs of government and community development. In addition to the task as intended, implementing government affairs delegated by the Regent / Mayor. Followed up by Regulation Karegesan Village district. Kauditan Kab. Minut No. 21 of 2004 which was subsequently replaced by the regional regulation and Village No. 11 of 2008 in the Law on Village Government Amendment Latest: Government Regulation (PP) No. 43 of 2014 on the Regulation on the Implementation of Law No. 6 of 2014 on the village, a variety of things set in Government Regulation No. 43 Year 2014 concerning the Implementation Regulations of Law No. 6 of 2014 on the village.

One village chief authority is to foster the life of the villagers. Coaching is one very important element in the process of infrastructure development for the community, be it guidance for the village and for the people. The purpose of the Infrastructure Development is better to change the lives of villagers. In practice, the village chief to use the concept of awareness and willingness of the people themselves to participate and assist the government in rural development better.

Keywords: *Leadership, Village Head, Infrastructure Development*

PENDAHULUAN

Wilayah negara kesatuan RI terbagi atas daerah provinsi, dan provinsi terbagi atas daerah yang lebih kecil yaitu Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa sampai Kelurahan. Daerah-daerah tersebut menjadi satu kesatuan dalam wilayah nagara RI. Oleh karena itu pembangunan harus tersebar secara merata dari seluruh wilayah Republik Indonesia agar terwujud masyarakat yang adil dan makmur. Dalam hal ini, pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.

Sosok kepemimpinan dituntut untuk profesional dan menguasai secara baik pekerjaannya melebihi rata-rata pegawai

yang ada, serta memiliki komitmen moral yang tinggi atas pekerjaannya sesuai dengan kode etik profesinya sebagai pemimpin. Pemimpin/Kepemimpinan merupakan subjek yang harus mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui tuntutan dan anjuran serta pengambil keputusan yang efektif kepada masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, serta Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Daerah, Desa, Daan Kelurahan, pasal 4, dijelaskan bahwa sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain tugas sebagaimana

dimaksud, melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota. Ditindak lanjuti dengan Peraturan Desa Karegesan Kec. Kauditan Kab. Minut Nomor 21 Tahun 2004 yang selanjutnya diganti dengan Peraturan Daerah dan Desa Nomor 11 Tahun 2008 dalam UU Pemerintahan Desa Amandemen Terbaru : Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berbagai hal diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini. Sosialisasi yang jelas serta bagaimana Pemimpin desa akan lebih mudah mengimplementasikan UU Desa adalah tugas setiap warga desa, serta menjaga agar sejumlah dana yang dapat digunakan semaksimal mungkin demi sebesar-besarnya kemakmuran warga masyarakat Desa. disebutkan bahwa: Desa merupakan wilayah kerja pemimpin Desa/ Kepala Desa sebagai perangkat daerah dalam Kepemimpinan wilayah kecamatan, Desa dipimpin yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. Desa merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil dari Suatu komunitas pemerintahan negara. Sehingga boleh dikatakan bahwa keberhasilan dalam melakukan pembangunan juga tergantung dari sejauh manapartisipasi masyarakat setempat beserta aparat pemerintah Desa dalam perencanaan pembangunan tersebut. Dalam arti masyarakat harus ikut berpartisipasi dan diberi kepercayaan dan kewenangan yang cukup dalam mengurus rumah tangga Desanya, sehingga bisa mandiri. Selain sebagai perencana dan pelaksana program pembangunan, maka para aparat pemerintah kelurahan juga berperan sebagai pelayan masyarakat dalam dan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah tersebut. Untuk itu

partisipasi masyarakat sangat diperlukan guna menunjang keberhasilan dari program pembangunan. Partisipasi masyarakat merupakan wujud dari terciptanya kemauan masyarakat dalam suatu program pemerintah khususnya program pembangunan bagi masyarakat. Salah satu wujud kemauan itu dengan adanya sikap mendukung terhadap penyelenggaraan program pemerintah yang ditujukan melalui partisipasi aktif anggota masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan.

Partisipasi masyarakat difungsikan sebagai faktor penentu keberhasilan program pemerintah. Menurut Nasution (2009:42) bahwa keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah dan desa juga tidak terlepas dari adanya peranserta atau partisipasi aktif anggota masyarakatnya, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan daerah/desa, karena secara prinsip penyelenggaraan otonomi ditunjuk guna mewujudkan masyarakat sejahtera di daerah atau desa yang bersangkutan.

Perubahan global serta bertambahnya Tuntutan masyarakat kepada pemerintah didalam memenuhi keinginan atau kebutuhannya semakin kuat, hal ini tentunya harus dilakukan melalui manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan administrasi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, termasuk didalamnya adalah Pemerintah Desa Karegesan Kec. Kauditan Kab. Minut

Berdasarkan tugas pokok Kepala Desa dalam Kepemimpinannya yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, disinilah penulis tertarik untuk memperdalam permasalahan yang timbul, dimana ada empat peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur yang ada di kelurahan. Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam penelitian ini, menggunakan

prinsip-prinsip manajemen sesuai teori yang dikemukakan oleh Siagian (1996:107): yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemberian motivasi, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Berdasarkan fungsi manajemen tersebut, keadaan yang tampak dilapangan berdasarkan pengamatan peneliti adalah:

1. Kepemimpinan Sebagai Perencana

Seorang pemimpin perlu membuat perencanaan yang menyeluruh bagi manajemen organisasi dan bagi diri sendiri selaku penanggung jawab tercapainya tujuan organisasi. Manfaat – manfaat tersebut antara lain :

- a. Perencanaan manajemen merupakan hasil pemikiran dan analisa situasi dalam pekerjaan untuk memutuskan apa yang akan dilakukan
- b. Perencanaan berarti pemikiran jauh ke depan disertai keputusan – keputusan yang berdasarkan atas fakta – fakta yang diketahui.
- c. Perencanaan berarti manajemen proyeksi atau penempatan diri ke situasi pekerjaan yang akan dilakukan dan tujuan atau target yang akan dicapai.

Dimana kepemimpinan Kepala Desa adalah sebagai perencana pembangunan infrastruktur, sesuai dengan pengamatan awal yang dilakukan ditemukan bahwa selama ini Kepala Desa belum berperan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur, hal ini dibuktikan dengan kurangnya intensitas kehadiran Kepemimpinan Kepala Desa pada saat rapat perumusan rencana pembangunan Infrastruktur yang dilaksanakan oleh masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan.

2. Kepemimpinan Sebagai Motivasi

Seorang pemimpin perlu selalu bersikap penuh perhatian terhadap anak buahnya. Pemimpin harus dapat memberi semangat, membesarkan hati, mempengaruhi anak buahnya agar rajin bekerja dan

menunjukkan prestasi yang baik terhadap organisasi dan manajemen yang dipimpinnya. Pemberian anugerah yang berupa ganjaran, hadiah, piujian atau ucapan terima kasih sangat diperlukan oleh anak buah sebab mereka merasa bahwa hasil jerih payahnya diperhatikan dan dihargai oleh pemimpinnya.

Di lain pihak, seorang pemimpin harus berani dan mampu mengambil tindakan terhadap anak buahnya yang menyeleweng, yang malas dan yang telah berbuat salah sehingga merugikan organisasi, dengan jalan memberi celaan, teguran, dan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Untuk melaksanakan fungsi fungsi ini sebaik- baiknya, seorang pemimpin perlu menyelenggarakan daftar kecakapan dan kelakuan baik bagi semua pegawai sehingga tercatat semua hadiah maupun hukuman yang telah diberikan kepada mereka.

Bukti selanjutnya adalah dalam Kepemimpinan Kepala Desa, jarang memberikan motivasi, himbauan, pembinaan kepada masyarakat untuk turut aktif terlibat dalam pelaksanaan pembangunan, amat terlebih dalam menggerakkan partisipasi masyarakat agar dapat melaksanakan pembangunan secara swadaya.

3. Peran Kepemimpinan sebagai pengambil keputusan

Pengambilan keputusan merupakan fungsi kepemimpinan yang tidak mudah dilakukan. Oleh sebab itu banyak pemimpin yang menunda untuk melakukan pengambilan keputusan. Bahkan ada pemimpin yang kurang berani mengambil keputusan. Metode pengambilan keputusan dapat dilakukan secara individu, kelompok tim atau panitia, dewan, komisi, referendum, mengajukan usul tertulis dan lain sebagainya.

Dalam setiap pengambilan keputusan selalu diperlukan kombinasi yang sebaik baiknya dari :

- a. Perasaan, firasat atau intuisi
- b. Pengumpulan, pengolahan, penilaian dan interpretasi fakta-fakta secara rasional – sistematis.
- c. Pengalaman baik yang langsung maupun tidak langsung
- d. Wewenang formal yang dimiliki oleh pengambil keputusan.

Kepala Desa sebagai pemimpin dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang ada di Desa dalam keputusannya dinilai belum maksimal, hal ini ditandai dengan tidak efektifnya pembangunan yang dilaksanakan, ada beberapa pembangunan yang dinilai mubasir, seperti pembangunan infrastruktur, pos kamling semenjak didirikan sampai dengan saat ini tidak pernah digunakan, tetapi sering digunakan untuk pertemuan informal, dan digunakan untuk tempat kumpul para anak muda yang sering menggunakan untuk kegiatan hura”, hal ini membuktikan bahwa rencana pembangunan yang telah dirumuskan melalui Musyawarah Rapat Pembangunan Desa (Musrembang) tidak dikoordinasikan oleh lurah kepada pemerintah kecamatan maupun pemerintah kota, sehingga proyek pembangunan yang datang seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4. Peran Kepemimpinan Sebagai Pengawas

Fungsi pengawasan merupakan fungsi pemimpin untuk senantiasa meneliti kemampuan pelaksanaan rencana. Dengan adanya pengawasan maka hambatan – hambatan dapat segera diketemukan, untuk dipecahkan sehingga semua kegiatan kembali berlangsung menurut rel yang telah ditetapkan dalam rencana .

Dalam melakukan pengawasan manajemen pembangunan infrastruktur didesa di nilai masih lemah, hal ini ditandai dengan kurangnya kehadiran lurah meninjau langsung pada saat pembangunan dilaksanakan, Kepala Desa juga terkesan apatis apabila pembangunan infrastruktur sedang dilaksanakan, sebagai bukti bahwa

dalam pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan, Kepala Desa hanya sekali datang dan tidak pernah meninjau langsung dalam memberikan arahan atau menanyakan mengenai kualitas materi yang dipakai, apakah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, Kepala Desa ada kalanya membiarkan begitu saja proyek pembangunan Infrastruktur yang sedang dilaksanakan, hal inilah yang menjadi perhatian peneliti, apa penyebab sikap apatis dari Kepemimpinan, Desa Karegesan Kec. Kauditan Kab. Minut dalam pembangunan infrastruktur Desa. Peneliti mengamati bahwa Kepala Desa lebih terkesan tidak peduli apabila ada pembangunan yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat, dilihat kurang adanya peran atau tinjauan langsung dari Kepemimpinan Desa/ Kepala Desa.

Tjokroamidjojo dalam Mustopadidjaja, (1998 : 51) Dalam kaitannya dengan permasalahan fenomena yang terjadi, khususnya dalam manajemen kepemimpinan infrastruktur pembangunan berkembang karena adanya lembaga-lembaga organisasi social, politik, dan perekonomiannya, agar pembangunan dapat berhasil. Dari sudut praktik, administrasi pembangunan merangkum dua kegiatan besar dalam suatu kesatuan pengertian, yakni administrasi dan administrasi pembangunan, baik dalam tatanan teoritik maupun dalam pemahaman praktik mengenai kepemimpinan manajemen organisasi dan pembangunan Di Desa Karegesan Kec. Kauditan Kab. Minut.

Hal-hal yang disebutkan merupakan fenomena yang menjadi masalah dalam penelitian ini, sehingga dijadikan alasan utama oleh peneliti untuk melakukan penelitian mengenai Kepemimpinan dalam pembangunan infrastruktur di Desa Karegesan Kec. Kauditan Kab. Minut

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan memberikan gambaran secara jelas suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, khususnya tentang Kepemimpinan dalam pembangunan infrastruktur di Desa Karegesan Kec. Kauditan Kab. Minut. Adapun bentuk penelitiannya adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang menekankan penggunaan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan terkait fokus penelitian sehingga dapat menemukan ruang lingkup tertentu. Data didapatkan dengan penelitian langsung ke lokasi penelitian.

B. Informan

Informan yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun rincian informan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Kepala Desa
- b) Sekretaris, Aparatur Desa
- c) Kepala Lingkungan
- d) Organisasi Masyarakat
- e) Tokoh dan Warga masyarakat

C. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah Kepemimpinan, Kepala Desa, dalam pembangunan infrastruktur di Desa Karegesan Kec. Kauditan Kab. Minut, berdasar teori yang dikemukakan oleh Siagian (1996:107) terdapat 4 fungsi dalam manajemen, yaitu:

1. Pengambil keputusan
2. Pemberian Motivasi.
3. Koordinasi pelaksanaan pembangunan.
4. Pengawasan.

Serta hal-hal lainnya yang akan berkembang selama penelitian ini dilaksanakan.

D. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data-data yang diperoleh berdasarkan sumbernya dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari informan dengan cara wawancara maupun pengamatan secara langsung, sedangkan data sekunder merupakan data yang bersumber dari dokumen-dokumen arsip tertentu yang berhubungan dengan penelitian (Koentjaraningrat, 1991:37).

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti atau pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Wawancara, adalah proses percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak berupa tanya jawab kepada sejumlah informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini.
- c. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca buku, dokumen-dokumen, undang-undang, dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan hal-hal pembanguan di Desa Karegesan Kec. Kauditan Kab. Minut

E. Analisis Data

Di dalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan akan dianalisa dengan teknik analisis kualitatif yakni data yang diperoleh akan dianalisis dalam bentuk kata-kata lisan maupun tulisan. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek penelitian. Serta hasil-hasil penelitian baik dari hasil studi lapang maupun studi literatur untuk kemudian memperjelas gambaran hasil penelitian (Sugiyono, 2008:88).

A. PEMBAHASAN

a. Peran Kepemimpinan dalam Pengambilan Keputusan

Keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Hal ini berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan dan mengenai unsur-unsur perencanaan. Dapat juga dikatakan bahwa keputusan itu sesungguhnya merupakan hasil proses pemikiran yang berupa pemilihan satu diantara beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya.

Keputusan itu sendiri merupakan unsur kegiatan yang sangat penting. Jiwa kepemimpinan seseorang itu dapat diketahui dari kemampuan mengatasi masalah dan mengambil keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat adalah keputusan yang berbobot dan dapat diterima bawahan. Ini biasanya merupakan keseimbangan antara disiplin yang harus ditegakkan dan sikap manusiawi terhadap bawahan. Keputusan yang demikian ini juga dinamakan keputusan yang mendasarkan diri pada relasi sesama.

Kemudian terdapat definisi menurut para ahli, antara lain :

Menurut George R. Terry (2000) : pengambilan keputusan adalah pemilihan

alternatif perilaku (kelakuan) tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada.

Menurut Sondang P. Siagian 1995 : pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling cepat.

Menurut James A. F. Stoner 2006 : pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah.

Dari definisi pengambilan keputusan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keputusan itu diambil dengan sengaja, tidak secara kebetulan, dan tidak boleh sembarangan. Pengambilan keputusan itu sendiri suatu cara yang digunakan untuk memberikan suatu pendapat yang dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cara / teknik tertentu agar dapat lebih diterima oleh semua pihak. Masalahnya terlebih dahulu harus diketahui dan dirumuskan dengan jelas, sedangkan pemecahannya harus didasarkan pemilihan alternatif terbaik dari alternatif yang ada.

Model pengambilan keputusan menurut Herbert A. Simon sebagai dasar menjelaskan proses pengambilan keputusan terdiri dari tiga tahap pokok yaitu:

1. Penyelidikan (Intelligence). Mempelajari lingkungan untuk menentukan kondisi keputusan. Data mentah diperoleh, diolah, dan disajikan untuk dijadikan petunjuk yang dapat mengidentifikasi persoalan.
2. Perancangan (Design). Mendaftar, mengembangkan, dan menganalisis arah tindakan yang mungkin. Hal ini meliputi proses-proses untuk memahami persoalan, menghasilkan pemecahan, dan menguji kelayakan pemecahan tersebut.

3. Pemilihan (Choice). Memilih arah tindakan tertentu dari semua yang ada. Pilihan ditentukan dan dilaksanakan.

dari penjelasan di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa untuk mengambil sebuah kebijakan pembangunan di desa perlu adanya *penyelidikan, perencanaan, sampai pemilihan kebijakan*, ketiga hal ini tidak dapat di pisahkan antara satu dengan yang lain. yang menjadi masalah di sini adalah banyak masyarakat yang tidak puas dan tidak setuju dengan pembangunan yang di buat pemerintah desa dengan alasan tidak tepat sasaran dengan apa yang di inginkan oleh masyarakat. Melihat fenomena ini penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam pengambilan keputusan pemerintah desa tidak menyelidiki atau observasi dengan baik apa yang menjadi masalah – masalah yang sentral dalam pembangunan yang ada di masyarakat, tetapi hanya melihat kebutuhan itu secara kasat mata, sehingga dalam merancang program dan pengambilan kebijakan itu tidak sesuai dengan permintaan masyarakat atau tidak tepat sasaran. Untuk masalah ini solusi yang tepat adalah bagaimana seorang kepala desa sebelum mengambil suatu keputusan untuk pembangunan harus melibatkan masyarakat, dan harus menggunakan tahapan – tahapan seperti penyelidikan, perencanaan dengan matang kemudian pemilihan alternative kebijakan.

- b. Peran kepemimpinan dalam Memotivasi

Bicara Soal motivasi Menurut Koontz (dalam Hasibuan, 2009: 219) motivasi mengacu pada dorongan dan usaha untuk memuaskan kebutuhan atau suatu tujuan. Sedangkan menurut Sukanto dan Handoko (1986) dalam buku Yuli (2005: 142) mendefinisikan motivasi sebagai keadaan dalam diri pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. Menurut

Wahjosumidjo (1984) dalam buku Yuli (2005: 142) mendefinisikan motivasi sebagai suatu proses psikologis yang mencerminkan interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi dan keputusan yang terjadi pada diri seseorang. Menurut Kreitner dan Kinicki (2000) dalam buku Yuli (2005: 143), motivasi merupakan proses psikologis yang meningkatkan dan mengarahkan perilaku untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Hasibuan (2009) dalam buku Sutrisno (2009: 111) motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah suatu keadaan/kekuatan potensial yang ada dalam diri manusia yang memberikan energi, mendorong kegiatan atau gerakan dan mengarahkan atau menyalurkan perilaku, yang dapat dikembangkannya sendiri atau dikembangkan oleh sejumlah kekuatan manajemen, yang pada intinya untuk memenuhi kebutuhan, yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja. Seorang pemimpin harus berperan juga sebagai seorang motivator bagi bawahannya. Motivator yang dimaksudkan adalah dimana seorang pemimpin mampu untuk memberikan dorongan kepada bawahannya dalam hal ini para perangkat desa dan masyarakat, dorongan yang dimaksudkan adalah dorongan untuk membuat meningkatkan kinerjanya baik dari segi waktu maupun dari kerja yang dilakukan oleh perangkat desa dan masyarakat tersebut dalam hal ini pembangunan di desa. Menurut kepala Desa yang merupakan pemimpin tertinggi dari karesiden ini Motivasi yang diberikan berupa semangat bahwa apa yang dilakukan oleh para perangkat desa dan masyarakat itu sudah bisa berupa amal ibadah, dan amal ibadah itu Tuhan yang menilai selain

itu kepala desa juga memberikan motivasi bahwa pembangunan yang di bangun ini merupakan fasilitas kita bersama jadi dalam membangunnya perlu adanya kerja sama yang baik baik pemerintah desa maupun masyarakat. Motivasi sering di lakukan di rapat umum yang di hadiri oleh perangkat desa, BPD, dan Masyarakat. Tapi dalam hal ini masih ada juga masyarakat yang belum turut berpartisipasi dalam pembangunan. Solusi mengenai hal ini kepala desa haruslah bersikap tegas dalam manggulangi masalah itu selain motivasi sosialisasi dalam melakukan program juga perlu untuk di tingkatkan, karena kadang kalah masyarakat tidak tau program apa yang akan dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal ini kepala desa.

c. Peran Kepemimpinan dalam Koordinasi Pembangunan

Koordinasi merupakan salah satu hal penting dalam administrasi dan manajemen dalam upaya untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Kerjasama antar individu dalam organisasi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menjalankan roda organisasi akan dapat berjalan dengan baik apabila terjadi suatu koordinasi yang efektif. Dengan demikian koordinasi merupakan salah satu hal yang ikut menentukan keberhasilan suatu organisasi. Istilah koordinasi menurut Westra (1983:54) dalam Rosyadi, (2009:23) jika dilihat dari segi etimologi merupakan serapan dari bahasa asing yang terdiri dari kata "cum" yang berarti berbeda-beda, dan kata "ordinate" yang berarti penyusunan atau penempatan sesuatu pada yang seharusnya atau semestinya. Dengan mengutip Westra, Rosyadi (2009:23) menjelaskan bahwa adanya koordinasi adalah karena adanya unit-unit kerja yang masing-masing menjalankan tugas, fungsi dan tanggungjawab yang merupakan konsekuensi dari adanya penerapan prinsip spesialisasi di dalam suatu organisasi.

Adanya perbedaan-perbedaan bidang tugas atau pekerjaan tersebut membutuhkan koordinasi agar masing -masing dapat melaksanakan tugas yang telah ada dengan satu tujuan bersama. Apabila pekerjaan yang cukup kompleks dalam suatu organisasi dilakukan tanpa adanya koordinasi, maka masing - masing bidang, unit, dan tugas tertentu akan berjalan ke arah yang tidak bertemu pada suatu tujuan yang sama. Sebagai sebuah perumpamaan maka dapat pula dikatakan bahwa adanya koordinasi bisa diibaratkan dengan jari - jari payung yang mempertemukan masing - masing ujung jari -jari payung pada suatu titik yang sama. Koordinasi merupakan penyelarasan secara teratur atau penyusunan kembali kegiatan -kegiatan yang saling bergantung dari individu - individu untuk mencapai tujuan bersama. Mengkoordinasikan adalah mengupayakan pengeluaran seimbang dengan sumber keuangan, perlengkapan dan alat - alat dengan kebutuhan produksi dan seterusnya. Secara singkat koordinasi dapat dikatakan sebagai (Widiatmoko:2012:18) : menyesuaikan hal -hal dan tindakan - tindakan perbandingannya yang tepat dan menyesuaikan antara alat dengan tujuan. Dari definisi diatas dapat di simpulkan bahwa koordinasi merupakan nyawa dalam organisasi baik dalam mengimplementasikan kegiatan organisasi maupun pembangunan. Bicara soal koordinasi antara kepala desa dengan perangkat desa dalam pembangunan bisa dikatakan sudah baik dan maksimal, begitu halnya dengan koordinasi antara kepala desa dengan BPD selaku lembaga Legislatif lokal di desa, dalam hal ini BPD menjangkit inspirasi masyarakat yang kemudian itu di lanjutkan kepada kepala desa untuk di jadikan program baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan Manusia. Yang bermasalah disini adalah koordinasi antara kepala desa dengan masyarakat desa ini yang sedikit

bermasalah, masyarakat seringkali tidak mengetahui program yang akan di jalankan oleh pemerintah desa. sehingga berdampak pada kurangnya aktivitas dan partisipasi dari masyarakat dalam pembangunan desa yang ada. Solusi kongkret mengenai masalah ini adalah bagaimana supaya pemerintah dalam pengambilan keputusan haruslah melibatkan semua masyarakat. Misalnya dalam pengusulan program, sampai pada evaluasi kebijakan pembangunan itu haruslah melibatkan masyarakat baik melalui partisipasi dana, maupun, gagasan dan pikiran, agar kebijakan itu bisa tepat sasaran.

d. Peran Kepemimpinan dalam pengawasan

Menurut Harold Koontz (Brantas, 2009:189) bahwa ”pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana - rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara.” Menurut Henri Fayol (Harahap, 2001:10) mengartikan bahwa :Pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelamahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya di kemudian hari. Menurut Maman Ukas (2006:343) menyatakan bahwa :Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Menurut Terry (Winardi, 2000:585) “Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil actual sesuai dengan hasil yang direncanakan.” Menurut Sondang P. Siagian (2002:73) menyatakan bahwa :Pengawasan adalah upaya yang sistematis untuk

mengamati dan memantau apakah berbagai fungsi, aktivitas dan kegiatan yang terjadi dalam organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya atau tidak. Hal senada diungkapkan oleh Gareth R. Jones, dkk (2000:313) menyatakan bahwa “Controlling is the process whereby managers monitor and regulate how efficiently and effectively an organization and its members are performing the activities necessary to achieve organizational goals.” Pengawasan adalah proses dimana manajer memantau dan mengatur bagaimana efisien dan efektif sebuah organisasi dan anggotanya melakukan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi).

Tujuan Pengawasan

Dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi maka pengawasan perlu dilakukan agar segala sesuatu yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dan ketika terjadi penyimpangan dapat langsung mengambil tindakan sebagai suatu koreksi. Karena pengawasan sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi maka ada beberapa tujuan pengawasan yang berguna bagi pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan pengawasan seperti yang dikatakan

Soekarno (Gouzali Saydam, 2000:197) tujuan pengawasan adalah :

- a. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah sesuai dengan instruksi.
- b. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah berjalan sesuai dengan rencana.
- c. Untuk mengetahui apakah kegiatan telah berjalan efisien.
- d. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan -kelemahan dalam kegiatan.

- e. Untuk mencari jalan keluar bila ada kesulitan, kelemahan atau kegagalan kearah perbaikan

yang menjadi masalah yang sentral dalam pengawasan adalah informan Menilai masih lemah, hal ini ditandai dengan kurangnya kehadiran kepala desa dalam meninjau langsung pada saat pembangunan dilaksanakan, Kepala Desa juga terkesam apatis apabila pembangunan infrastruktur sedang dilaksanakan, sebagai bukti bahwa dalam pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan, kepala desa hanya sekali datang dan kadang tidak turun langsung meninjau langsung dalam meninjau langsung dalam memberikan arahan atau menanyakan mengenai kualitas materi yang dipakai, apakah sesuai dengan rencana rancangan dan ketentuan yang telah ditetapkan, kepala desa ada kalanya membiarkan begitu saja proyek pembangunan infrastruktur yang sedang dilaksanakan, tujuan dalam masalah ini adalah bagaimana seorang kepala proaktif dalam rangka melakukan pengawasan agar supaya dalam implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang ada. Agar supaya dalam tujuan dari pengawasan dapat terwujud. Selain itu peran pengawasan tidak juga harus dilakukan oleh kepala desa saja, tetapi dalam hal ini semua orang yang terkait dengan pembangunan itu harus juga ikut mengawasi pembangunan agar tidak terjadi dalam korupsi dan permainan dalam proyek pembangunan tersebut. Perangkat desa, BPD dan masyarakatpun perlu ikut dalam mengawasi semua proyek pembangunan yang ada. Karena ini merupakan tanggung jawab bersama.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Salah satu kewenangan Kepala Desa adalah membina kehidupan masyarakat desa. Pembinaan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam proses pembangunan Infrastruktur bagi masyarakat, baik itu pembinaan bagi perangkat desa maupun bagi masyarakatnya. Tujuannya adalah agar perangkat desa dan warga masyarakat tahu dan mengerti apa yang harus dikerjakan serta timbul kemauan untuk ikut aktif dalam setiap program pembangunan masyarakat. Aktivitas pembinaan kehidupan masyarakat dilakukan oleh Kepala Desa melalui nilai-nilai Kepemimpinan dan watak seorang pemimpin yang tegas dalam pengambilan keputusan yang dari dahulu memang dianut oleh setiap pemimpin khususnya kepala desa mulai terkikis untuk dibangkitkan kembali. Tujuan dari Pembangunan Infrastruktur ini adalah perubahan lebih baik untuk kehidupan masyarakat Desa. Dalam praktiknya Kepala Desa menggunakan konsep kesadaran dan kemauan dari dalam masyarakat itu sendiri untuk berpartisipasi dan membantu pemerintah dalam pembangunan desa yang lebih baik.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab berkaitan dengan Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanakan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan maka langkah akhir dari penulisan skripsi ini adalah menarik kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya yaitu :

1. Dalam motivasi dapat di simpulkan kepala desa dalam hal ini sudah melakukan dengan baik, baik motivasi kepada para perangkat desa maupun pada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dengan baik dalam pembangunan.

2. Dalam pengambilan keputusan dalam hal ini kepala desa belum terlalu baik, hal ini di benarkan oleh informan yang mengatakan bahwa tingkat kepuasan masyarakat pada pembangunan yang di lakukan oleh pemerintah bisa di katakan belum puas dan tepat sasaran.
3. Dalam bidang koordinasi bisa dikata sudah baik dalam hal ini koordinasi antara BPD dan perangkat desa dalam hal perencanaan pembangunan. Tapi yang menjadi masalah kongkret koordinasi dari kepala desa dan masyarakat belum di katakan baik karena kadang kalah masyarakat tidak mengetahui program yang di lakukan oleh pemerintah.
4. Di bidang pengawasan kepala desa harus di tingkatkan dalam pembangunan agar tidak terjadi kesalahan dalam implementasi pembangunan.

B. Saran

1. dengan melihat hasil penelitian maka yang menjadi bahan rekomendasi dari penulis, di bidang motivasi adalah di mana peran kepala desa dalam memotivasi para perangkat desa dan masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan.
2. Di lihat dari pengambilan keputusan kepala desa dalam mengambil keputusan dalam perencanaan pembangunan. Haruslah menggunakan tahapan penyelidikan masalah – masalah yang sentral dalam masyarat, barulah masuk pada perencanaan program kemudian tahapan terahir adalah eksekusi program, agar supaya dalam hal ini masyarakat merasa puas. Kepala desa juga harus terjun di masyarakat langsung untuk mencari tau apa yang menjadi keperluan dari masyarakat.
3. Di lihat dari koordinasi antara kepala desa, perangkat desa, dan BPD

haruslah dipertahankan. Untuk kepentingan masyarakat. Kemudian perlu juga koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat karena masyarakat adalah sebagai penerima layanan. Partisipasi dari masyarakat dari perencanaan sampai pada controlling itu sangat perlu. Baik itu sumbangsi dana, pikiran maupun tenaga dari masyarakat.

4. Dalam pengawasan kepala desa haruslah proaktiv dalam mengawasi proyek pembangunan agar tidak terjadi penyelewengan dab korupsi dalam proyek tersebut. Selain itu perlu adanya kerja sama antara semua pihak baik Kepala desa, Perangkat desa, BPD maupun masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Brantas, 2009, *Dasar-dasar Manajemen*, Bandung: Penerbit Alfabeta
- Harahap, Sofyan, 2001. *Sistem Pengawasan Manajemen*, Penerbit Quantum, Jakarta
- Maman Ukas, 2006, *Manajemen*. Cetakan keenam Edisi Revisi. Penerbit Aghini. Bandung
- Koentjaraningrat. 1991. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. PT.Gramedia Pustaka, Jakarta
- James A.F., Stoner. 2006. *Management*
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung
- Sondang P. Siagian, 1995, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, PT. Elek Media Kompetindo.
- , 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Asdi Mahasatya
- Simon, A. Herbert. 2004. *Administrative Behavior, Perilaku Administrasi* :

Suatu Studi tentang Proses Pengambilan Keputusan dalam Organisasi Administrasi, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, Alih Bahasa ST. Dianjung, Bumi Aksara, Jakarta.

Sutrisno. 2009. Manajemen Keuangan Teori, Konsep, dan Aplikasi. Ekonisia, Kampus Fakultas Ekonomi UII, Jakarta

Terry, George R. 2000. Principles of Management Alih Bahasa Winardi. Penerbit Alumni, Bandung
dosen.uta45jakarta.ac.id
(Diakses tanggal 14 Mei 2015)

Yuli, S.B.C. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia. Malang: Universitas Muhammadiyah
Winardi, 2000, Manajer dan Manajemen . Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sumber dan Literatur Lain:

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 72 Tahun 2005
- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Peraturan Desa Nomor 11 Tahun 2008